

**FUNGSI PENGAWASAN BPD DI DESA SELOPAMIORO  
KECAMATAN  
IMOGIRI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM  
ISLAM**

**OLEH :**

**ARI PRIYO WIJONGKO**

**NIM. 12370012**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. OMAN FATHUROHMAN S.W, M.Ag.**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Desa Selopamiro memiliki luas wilayah yang besar, serta daerah administratif jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Imogiri menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terbesar. Namun demikian, dengan terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Selopamiro maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Selopamiro pada masa ke masa.

Penelitian yang dilakukan di Desa Selopamiro menggambarkan kehidupan masyarakat yang kurang sejahtera. Terlihat dari kondisi lingkungan dan aktifitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dampak yang terjadi atas kesenjangan sosio-ekonomi dilingkungan desa menjadi kajian yang menarik dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Berlakunya Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa selayaknya magnet bagi jamak orang untuk memperhatikan desa, bukan sekedar mendapatkan akses anggaran yang besar, tetapi desa memiliki kesempatan untuk mengelola sumberdaya secara mandiri.

Penelitian ini menggunakan teori Siyash Syar'iyah yang mempunyai prinsip keadilan serta amanah kepemimpinan, dimana dalam menentukan hukumnya bisa kita ambil melalui masalah mursalah atau saddu dzari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (field research), serta menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan pendekatan Deskriptif analisis.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Kebijakan, Pengawasan, dan Siyash Syar'iyah

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
NIM : 12370012  
Judul : "FUNGSI PENGAWASAN BPD DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA SELOPAMIORO  
IMOGIRI BANTUL D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF  
SIYASAH SYARIYYAH"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Pembimbing,



Drs. H. OMAN FATHUROHMAN, SW M.Ag.  
NIP. 195703021985031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-378/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Fungsi Pengawasan BPD di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta Perspektif Siyasah Syariyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARI PRIYO WIJONGKO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370012  
Telah ditujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 20 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Yogyakarta

Rektor

Dr. H. M. Nurcholish, Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
NIM : 12370012  
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:  
“FUNGSI PENGAWASAN BPD DALAM PEMBANGUNAN DI DESA  
SELOPAMIORO IMOGIRI BANTUL D.I YOGYAKARTA PERSPEKTIF  
*SIYASAH SYARIYYAH*”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan  
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian  
ini dan disebutkan dalam geuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Ari Priyo Wijongko  
12370012

**MOTTO**

**“FINISH WHAT HAVE YOU STARTED”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua saya**

**Skripsi ini saya persembahkan Almamater**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sering  
nanya**

**“kapan wisuda ?”**

**DAN SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN JUGA  
UNTUK**

**PENDAMPING HIDUP SAYA. (kelak)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye



ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عنة	ditulis	' <i>illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----- ----- -----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----- ----- -----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yāḏhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كِرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu	ditulis	<i>ū</i>
mati	ditulis	<i>furūḍ</i>
فِرْوَض		

#### F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu	ditulis	<i>au</i>
mati	ditulis	<i>qaul</i>
قَوْل		

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Fungsi pengawasan pembangunan di desa selopamiro, Imogiri, Bantul, D.I Yogyakarta Perspektif Siyash Syariyyah" ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini. Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai

pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.A.g., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M. Nur, S.A.G., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.A.g., selaku dosen pembimbing skripsi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.
7. Kepada TU Staff Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kedua orang tua Ari, Ayah H Surono. dan HJ. Ibu Supardiyati. Terima kasih telah membesarkan serta mendidik Ari. Terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan Ari hingga ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do'a dan restu yang selalu ditujukan kepada Ari dalam meniti tangga kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

tiada hentinya Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu. Amin.

9. Seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Pejabat Pemerintah Desa Selopamiro dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Selopamiro yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Amin

Yogyakarta, Juli 2019



Penulis

Ari Priyo Wijongko

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN DAN ARAB .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	9

F. Metode Penelitian .....	12
G. Lokasi Penelitian .....	15
H. Metode Pengambilan Data .....	16
I. Pengolahan Data .....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI <i>SIYASAH SYARIYYAH</i></b> .....	<b>21</b>
A. Konsep <i>Siyasah Syariyyah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Siyasah Syariyyah</i> .....	17
2. Sumber Hukum <i>Syariyyah</i> .....	26
3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Syariyyah</i> .....	28
B. Pokok Pemikiran <i>Siyasah Syariyyah</i> .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Profil Daerah Penelitian.....	37
B. Pelaksanaan Fungsi BPD.....	49
C. Fungsi Pengawasan.....	63
<b>BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BPD PERSPEKTIF</b> <b><i>SIYASAH SYARIYYAH</i></b> .....	<b>77</b>

A. Peran BPD Dalam Merumuskan Program Dan Kebijakan Pembangunan Di Desa Solopamioro, Imogiri, Bantul D.I Yogyakarta.....	77
B. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Peran BPD Dalam Merumuskan Program Dan Kebijakan Pembangunan.....	85
C. Faktor–Faktor yang mempengaruhi efektivitas BPD Dalam Menjalankan Funsinya sebagai Pangawas.....	87
BAB V PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai slogannya ”*kerja, kerja dan kerja*” pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berhasil mewujudkan pembangunan Indonesia dari pinggir. Melalui *Nawa Cita*-nya, pemerintahan kali ini berusaha mengembangkan otonomi daerah dengan mewujudkan kemandirian desa. Berlakunya Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa selayaknya magnet bagi jamak orang untuk memperhatikan desa. tidak sekedar mendapatkan akses anggaran yang besar, desa pun memiliki kesempatan untuk mengelola potensi secara mandiri.

Dampaknya pemerintahan Jokowi telah berhasil mewujudkan beberapa program pembangunan desa. Selama ini pemerintah pusat berhasil mendirikan 26.070 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 123.145 Km Jalan desa, serta 5.220 pasar desa. Tidak hanya itu, pemerintah desa pun mendapat akses untuk memperoleh anggaran yang bersumber dari APBN. Ditargetkan setiap desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 1,4 M dalam setiap tahunnya.<sup>1</sup> Meski tidak sedikit orang yang mempertanyakan kesuksesan program ini,

---

<sup>1</sup> <http://kemendesaco.id>. 16 Agustus, 2018; pukul 18:14

setidaknya pencapaian kinerja tersebut dapat menjadi tolak ukur berkurangnya kemiskinan di desa.

Bayak kalangan mempersoalkan besarnya akses dan sumber anggaran desa tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dikhawatirkan pemerintah desa tidak dapat memaksimalkan kinerja pembangunan sebagaimana telah direncanakan. Tidak hanya itu, potensi ini pun dikhawatirkan menjadi lahan korupsi bagi pemerintahan desa. bukan tanpa alasan, sejak diberlakukannya Undang-undang Desa telah terjadi penangkapan 800 kepala desa karena kasus tindak pidana korupsi. Bukan sekedar korupsi perangkat desa, kasus ini juga menjadi dasar pentingnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Maka dari itu, untuk menciptakan pembangunan desa yang ideal dan efektif, diperlukan sebuah pengawasan kinerja pemerintahan yang baik dan benar. Tidak cukup pengawasan kerja pada pemerintah daerah kabupaten/kota, pengawasan harus diimplementasikan sampai pada sektor desa.

Berbicara fungsi pengawasan pada desa tentu tidak lepas dari peran yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Peran BPD sangat penting dalam pembangunan desa. Sebagai satu kesatuan kerja pembangunan desa BPD tidak sekedar berfungsi sebagai pengawas kerja pemerintah desa. BPD termasuk anggota badan anggaran desa

yang tergabung dalam forum Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Serta berperan untuk mengevaluasi tahunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pentingnya kolaborasi kesatuan kerja dalam pemerintahan merupakan sebuah jaminan keberhasilan pembangunan desa. Besarnya potensi kesalahan yang ada telah mengantarkan perhatian penulis pada sebuah desa di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. Pada konteks ini penulis secara khusus memberikan perhatian pada keterlibatan BPD dalam merumuskan dan mengevaluasi kinerja pemerintah di desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Menurut pengamatan sederhana yang dilakukan, desa Selopamioro merupakan desa yang tidak begitu terpencil. Namun realitanya, terpapar kehidupan masyarakat yang kurang sejahtera. Tergambar dari kondisi lingkungan dan aktifitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dampaknya terjadi kesenjangan sosial-ekonomi di lingkungan masyarakat. Terkesan pemerintah desa tidak memberi perhatian pada permasalahan ini. Maka dalam penelitian ini berjudul **“Fungsi Pengawasan BPD Dalam Pembangunan di Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Perspektif *Siyasah Syariah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana peran BPD dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan di Desa Solopamioro, Imogiri, Bantul D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh kinerja BPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Solopamioro?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin tercapai ialah

1. Mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi BPD dalam merumuskan pembangunan desa Solopamioro, Imogiri, Bantul D.I. Yogyakarta.
2. Menjelaskan kinerja yang dilakukan oleh BPD dalam merumuskan dan merealisasikan program pembangunan di desa Solopamioro, Imogiri, Bantul D.I. Yogyakarta.

### 3. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan teori bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara (HTN). Serta memberikan informasi yang berkaitan dengan tatacara perumusan dan implementasi pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang kebijakan pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa bukan pertama kali dilakukan. Beberapa peneliti sebelumnya telah berhasil menyumbangkan subangsih gagasan dan pengawasan dalam upaya



mewujudkan kesejahteraan di desa. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang tentang sistem pemeritahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Monna Variesta Inna Chutmainsintia (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Dalam skripsinya penyusun menyebutkan ada ketidak harmonisan antara Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menyalurkan dana BLSM. Ditemukan ketimpangan koordinasi dalam pendataan masyarakat penerima BLSM.<sup>2</sup> Ditemukan banyak BLSM tersalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi tidak layak menerima bantuan. Pun termasuk temuan masyarakat layak menerima yang tidak terdaftar pada saat pendataan. Penyebabnya adalah kinerja pemerinta desa yang kurang maksimal dalam melakukan pendataan. Termasuk fungsi kontrol BPD yang tidak sama sekali dipakai dalam proses pendataan penerima BLSM.

---

<sup>2</sup> Monna Variesta Inna Chutmainsintia, “Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

Mahmudi (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No.3 Tahun 2010”. Dalam skripsi ada program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga di desa Brosot. Dalam penerapan kebijakan ini ditemukan kurangnya efektifitas kebijakan. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar perangkat desa dalam merealisasikan program unggulan tersebut. Temuan lain, tidak efektifitasnya kebijakan ini karena tingkat partisipasi masyarakat yang masih lemah. Penelitian ini memberikan gambaran pola koordinasi pemerintah Desa dalam merealisasikan program, pemberdayaan dan kompetensi Masyarakat Desa. Namun perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada program berbasis kekeluargaan di Desa. Sedangkan penelitian ini fokus pada efektifitas BUM Desa yang secara struktural merupakan lembaga Desa non-struktural (aset asli Desa).

Selanjutnya skripsi dari Ulfatul Istiqlaliah Prodi Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dengan judul “Kerjasama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan

Studi Kasus di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”.<sup>3</sup> Skripsi ini membedah persoalan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa dan meneliti realisasi yang terjadi dilapangan, apakah kordinasi antara pemerintah desa dengan BPD sudah efektif untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik.

Skripsi dari Iis Qomariah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa”.<sup>4</sup> Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi tersebut hanya maninjau peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai masa jabatan kepala desa, dengan meneliti dan mengkorelasikan realitas yang ada di salah satudesas di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan cangkupannya lebih luas, tidak hanya persoalan

---

<sup>3</sup>Ulfatul Istiqlaliah “Kerjasama Pemerintahan Desa Studi Kasus Di kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jutentang rusan Ilmu Hukum, Universitas Islm Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.

<sup>4</sup>Iis Qomariah “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.

masa jabatan saja, tetapi juga meneliti efektifitas dan tidaknya masa jabatan tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa untuk kemandirian desa.

Selanjutnya skripsi Ali Nazmudin yang berjudul “Peran pemerintah Desa Terhadap Upaya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”.<sup>5</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor ekonomi pemerintahan desa. Hal tersebut tentunya berkaitan juga tentang manajemen pemerintahan. Disitu dijelaskan manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Teori *Siyasah Syariyyah*, dimana menurut Ibnu ‘Aqil *Siyasah* mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, tindakan atau perbuatan *Siyasah* harus berdasar pada kepentingan banyak orang (masyarakat). Secara kontekstual teori ini memiliki tujuan untuk mengukur kebijakan dan efektifitas kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin. *Kedua*, kebijakan

---

<sup>5</sup>Ali Nazmudin yang berjudul “Peran pemerintah Desa Terhadap Upaya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)” tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

diambil berdasar pada aspirasi publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keburukan. *Ketiga*, siyasah dalam ranah *ijtihadi* dimana kebijakan publik diambil tidak memiliki sumber di Al-Quran dan *As-Sunnah*. Pandangan sekaligus mengkonfirmasi dasar-dasar kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan dalam sebuah negara. *Siyasah Syar'iyah* secara teoritik merupakan bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengautran urusan masyarakat dan negara dalam bentuk hukum dan kebijakan oleh pemimpin. Prinsip dasar pengaturan tersebut harus berdasar pada prinsip *syariat* Islam.<sup>6</sup>

Tujuannya adalah untuk memberikan batasan kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin. Secara esensial *Siyasah Syar'iyah* merupakan landasan teori yang menjadi dasar kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam pandangan lain, teori ini memiliki batasan tau rambu-rambu syariat bagi kepemimpinan yang ideal, yaitu : (1) *dalil-dalil kully*, (2) *muqasid syariah*, (3) semangat ajaran Islam, serta (4) kaidah *kulliyah fihiyah*.<sup>7</sup> dengan demikian *Siyasah Syar'iyah* merupakan tolak ukur bagi seorang pemimpin dalam membuat

---

<sup>6</sup>Abdul, Wahab Kallaf, Ilmu Usul Fiqih, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm 12.

<sup>7</sup>Wahban Zahaily. *Usul Fiqih, Kulliyat Dakwah Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997. hlm, 89

peraturan dan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat, menegakan hukum dan memelihara etika.

Dengan demikian, istilah *Siyasah Syar'iyah* merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana berikut :

- a. Semua tindakan atau kebaikan yang diambil oleh penguasa dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- b. Sering kali tidak ada dalil *syar'i* yang secara khusus yang memerintahkan dilakukannya tindakan atau kebijakan
- c. Kebijakan tersebut harus selaras dengan dalil-dalil *syar'i* yang bersifat umum dan sesuai dengan kaedah *kulliyat* (hukum umum).

Dikemukakan oleh ulama Ibnu Taimiyyah tentang beberapa masalah yang memasuki ranah kewenangan *Siyasah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 s.d. 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ibnu Taimyiah memiliki pandangan kedua ayat tersebut merupakan landasan kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kepemimpinan. Ayat pertama menjelaskan tentang tanggungjawab seorang pemimpin, sedangkan pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban masyarakat untuk taat kepada pemimpin. Tidak hanya sekadar itu, ayat ini pun dapat menjadi dasar bagi seorang pemimpin menggambarkan sikap dan kepatutan seorang pemimpin.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Peneliti dilakukan berdasar pada tujuan untuk memperoleh

informasi dan data sedekat mungkin dengan sumber di lapangan sehingga pembaca hasil penelitian dapat memanfaatkan dengan baik.<sup>8</sup>

Dalam hal ini penulis menspesifikasikan pada pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk melihat hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial. Langkah ini digunakan karena obyek pembahasan berkaitan dengan hukum secara yuridis. Sedangkan secara sosiologis untuk mengatur sejauh mana pelaksanaan terhadap peraturan diberlakukan kepada masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Soerjono Soekampto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perUndang-Undang tersebut dilapangan.<sup>9</sup> Oleh karena itu perlu adanya dua sumber yang berbeda yaitu dari pihak Desa dan Pemerintahan Desa yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat

---

<sup>8</sup>Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 89.

<sup>9</sup>Soekamto, Soerjono, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 96.



mengetahui kondisi yang terjadi antara kordinasi dari kedua pihak. Selain itu data yang diperoleh akan diolah untuk menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi objek yang akan diuraikan secara naratif.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari Undang-undang dan data yang didapatkan secara langsung dari sumber berupa hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada subyek penelitian.

#### b. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui perantara berupa informasi yang terdapat di dalam buku-buku dan literatur lain berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya. Pengambilan data dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai refrensi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan dibutuhkan.

#### 1) Sumber Hukum Primer

a) Naskah akademik Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

c) Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 Tebtang  
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

2) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang sumber hukum primer dan membantu penulis untuk memahami sumber hukum primer. Bentuknya berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang didapat dari sumber internet atau sumber lain.

**G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## H. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Setelah melaksanakan studi pustaka maka penelitian dilanjutkan dengan pengamatan terhadap kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Observasi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh pola kerja pengawasan, serta keterlibatan BPD dalam mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Selopamiro.

### 2. Wawancara

Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan sumber data. Sumber dalam penelitian ini meliputi Kepala BPD, Kepala Desa Selopamiro dan ketua Badan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Tidak hanya itu, peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang diperoleh peneliti dari asis wawancara dengan sebagian masyarakat desa.

### 3. Studi Pustaka

Sebelum dilakukannya penelitian langsung dilapangan terlebih dahulu peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dalam Undang peraturan perundang-undangan, serta buku atau karya ilmiah lain. Permasalahan yang ditemukan selanjutnya akan dikaji dan dikelola untuk menunjang analisis pada penelitian ini.

#### I. Pengolahan Data

Kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks secara apa adanya melalui pengumpulan data dari sumbernya langsung.<sup>10</sup> Analisi data akan dilakukan untuk menguak tentang pelaksanaan dan pengawasan Badan Perwakilan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa Selopamioro.

Deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan secara lengkap mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan fenomena objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya pengolahan

---

<sup>10</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 250.

data akan dinarasikan secara sistematis dan objektif.<sup>11</sup> Cara ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk menjelaskan temuan data secara utuh dan menyeluruh.

Induktif, tentang pola fikir yang mengawali penjelasan permasalahan khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum dari publik.<sup>12</sup> Secara terperinci hasil temuan data tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD akan dipaparkan dan ditarik kesimpulan berdasar pada temuan data dan pendapat umum

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Karya ilmiah (skripsi) ditulis secara sistematis merukan kewajiban peneliti untuk menyampaikan temuan secara utuh. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak mengalami kesulitan saat menyerap informasi yang dipaparkan. Tidak hanya itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kekayaan referensi bagi civitas akademik yang kelak akan meniti objek yang sama.

Bab *pertama*, memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>12</sup>Sukandae Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012), hlm. 38.

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar pembahasan yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab *kedua*, sebagai landasan teori dari masalah yang akan dibahas, mengulas mengenai fungsi dan kewenangan Badan Pemerintah Desa. Serta gambaran umum strategi pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang data kebijakan Pemerintah Desa tentang mewujudkan kesejahteraan masyarakat bedasar pada rumusan dan evaluasi pembangunan desa. Sebagai permulaan akan dibahas mengenai bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Desa tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes). Data yang diperoleh kemudian diklarifikasikan secara kontekstual berdasar pada kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. langkah ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peran BPD dalam menjaga efektifitas pembangunan desa Selopamioro.

Bab *keempat*, merupakan inti penelitian yang berisi analisis mengenai jenis kebijakan pemerintah desa dan fungsi pengawasan BPD. Strategi dan kewenang BPD yang secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerinta Desa Selopamioro dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Serta menganalisis seberapa besar pengaruh BPD dalam menjaga efektifitas pembangunan desa.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan pada akademisi atau peneliti yang akan melakukan penelitian dikemudian hari.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Selopamioro dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya. Temuan dilapangan diketahui bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tentang fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.



2. Permusyawaratan terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. BPD yang ada di Desa Selopamioro dalam pembangunan desa berdampingan dengan Kepala Desa untuk selalu dapat bersinergi dalam menentukan kebijakan dan mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan desa yang baik juga akan terwujud apabila Pemerintah Desa mampu membuat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

#### B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Desa Selopamioro agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Selopamioro. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Desa Selopamioro telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993

Certo, Samuel C, Certo & S. Travis, *Moderen Management*, Person Prentic, 2006.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Iqbal, Muhammad, *fiqh siyasah*, Jakarta: gaya media pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta:PT Kecana Prenade Media Group, 2014.

Kallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Rumidi, Sukandae, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* Salim, Abdul Muim, *Konsep Kekuasaan Dalam Al Quran*, Jakarta :Raja grafindo Persada, 1994.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.

*Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhaily, Dr. Wahbah. *Usul Fiqih Kulliyat Dakwah Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

## **INTERNET**

<http://kemendesaco.id>. 16 Agustus, 2018

## **JURNAL**

Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.

## **SKRIPSI**

Ali Nazmudin. “Peran pemerintah Desa Terhadap Upaya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)” diterbitkan Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013

Iis Qomariah “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.

Monna Variesta Inna Chutmainsintia, *“Kordinasi Pemerintahan Desa Dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Desa Ngapanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”*. Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

Mahmudi *“Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No.3 Tahun 2010”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014

Ulfatul Istiqlaliah *“Kerjasama Pemerintahan Desa Studi Kasus Di kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Lampiran*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

<b>HLM</b>	<b>Nomor Footnoe</b>	<b>Ayat al-Quran</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
9	58	Surah An-Nisa ayat 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat
9	59	Surah An-Nisa	Hai orang-orang yang

		ayat 59	beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
--	--	---------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Himawan Syadki  
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 16 Juni 1984  
Profesi : Kepala Desa  
Alamat : Sruk II, Selopamioro, Imogiri, Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamioro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
Nim : 12370012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SELOPAMIORO  
PEMERINTAH DESA SELOPAMIORO  
(HIMAWAN SAJADII.)  
KECAMATAN





### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Danang Kumorojati, S.Pd.  
Tempat, Tgl Lahir : Bantul. 27 Juni 1987  
Profesi : Pamong Desa  
Alamat : Suk 1 rt 09. Selopamiro

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamiro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
Nim : 12370012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Pina Mariyanti  
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 16 Maret 1995  
Profesi : Mahasiswa  
Alamat : Kalidadar I, Imogiri Bantul

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamiro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
Nim : 12370012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2019

Ra.  
(Pina Mariyanti)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : PAPIIN  
Tempat, Tgl Lahir : Bantul 2.10.1965  
Profesi : Dukuh  
Alamat : KALIDADAP U selopamioro, Imogiri - Bantul .

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamioro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
Nim : 12370012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2.08.2019

  
(...PAPIIN...)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Rima Rosita  
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 24 April 1977  
Profesi : Kary. swasta  
Alamat : Grunggo. II Selopamiro Imogiri Bantul


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamiro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : Ari Priyo Wijongko  
Nim : 12370012  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

  
(.....Rima Rosita.....)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Wahdi Setyanan*  
Tempat, Tgl Lahir : *10 Juli - 1995*  
Profesi : *Ketua B.P.D. Ds Selopamiro, Imogiri, Bantul*  
Alamat : *STUNGRO 2, Selopamiro, Imogiri, Bantul*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "Fungsi Pengawasan BPD dalam Pembangunan di Desa Selopamiro Imogiri Bantul D.I Yogyakarta Perspektif Siyasa Syariyyah" yang di susun oleh:

Nama : *Ari Priyo Wijongko*  
Nim : *12370012*  
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*  
Jurusan : *Hukum Tata Negara*  
Alamat : *Jl. Munggur No 24 Pengok Gondokusuman Yogyakarta.*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ari Priyo Wijongko
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Riau, 18 Januari 1994
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi Badan : 170 CM
7. Berat Badan : 60 KG
8. Agama : Islam
9. Alamat Asal : Ds.Sumber Makmur RT 14 RW 07  
Kec. Tapung Kab. Kampar Riau
10. Alamat Tinggal : Jalan Munggur no 24 Pengok  
Gondokusuman 55221 Daerah Istimewa  
Yogyakarta
11. Nomor HP : 085648825918
12. Email : [aripriyo1994@gmail.com](mailto:aripriyo1994@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

- SDN Sumber Makmur Riau (2000-2006)
- SMP Islam Al-Arief Jambi (2006-2009)
- MASS Tebuireng Jombang (2009-2012)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012-sekarang)  
Yogyakarta